

BAB III

PROFIL FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG

3.1. Sejarah Fakultas Syari'ah

UIN Imam Bonjol Padang merupakan salah satu perguruan tinggi Islam negeri yang memiliki peranan penting dalam perkembangan pendidikan Islam di Sumatera Barat. Fakultas Syari'ah menjadi salah satu fakultas tertua yang berdiri bersamaan dengan lahirnya institut tersebut. Secara historis, keberadaan Fakultas Syari'ah tidak dapat dipisahkan dari proses berdirinya IAIN Imam Bonjol yang kemudian bertransformasi menjadi UIN Imam Bonjol Padang. Cikal bakal berdirinya UIN Imam Bonjol Padang dimulai dari berdirinya Fakultas Tarbiyah cabang IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Padang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 1963. Selanjutnya, pada tanggal 29 November 1966, pemerintah resmi mendirikan IAIN Imam Bonjol Padang melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1966. Pada saat peresmian tersebut, IAIN Imam Bonjol memiliki empat fakultas yang tersebar di beberapa daerah di Sumatera Barat, yaitu Fakultas Tarbiyah di Padang, Fakultas Ushuluddin di Padang Panjang, Fakultas Adab di Payakumbuh, dan Fakultas Syari'ah di Bukittinggi. (<https://fs.uinib.ac.id>)

Gambar 3.1
Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang



Sumber: Dokumentasi Tanggal 20 Mei 2026

Fakultas Syari'ah pada awal berdirinya berlokasi di Bukittinggi dengan Jurusan Qadha (Hukum Islam) sebagai jurusan pertama yang dibuka. Fakultas ini berasal dari Fakultas Agama Islam Syar'iyyah (FAIS) Yayasan Imam Bonjol Bukittinggi yang kemudian dinegerikan menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol. Pada masa awal perkembangannya, sarana dan prasarana perkuliahan masih sangat terbatas. Aktivitas administrasi dan perkuliahan dilaksanakan secara berpindah-pindah di beberapa gedung pinjaman di Bukittinggi. Dalam perkembangan berikutnya, kebijakan rasionalisasi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri pada tahun 1973–1977 menyebabkan terjadinya sentralisasi fakultas-fakultas ke Kota Padang. Fakultas Syari'ah yang sebelumnya berada di Bukittinggi secara bertahap dipindahkan ke Padang dan dijadikan sebagai fakultas induk. Perkuliahan tingkat doktoral telah dimulai sejak tahun 1975, sedangkan penerimaan mahasiswa tingkat pertama dimulai pada tahun 1976. Pada masa tersebut, Fakultas Syari'ah mulai mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dari jumlah mahasiswa maupun tenaga pengajar. Tahun 1977 menjadi tonggak penting karena Fakultas Syari'ah berhasil meluluskan mahasiswa pertamanya dari Jurusan Qadha. (<https://fs.uinib.ac.id>)

Selanjutnya, Fakultas Syari'ah terus berkembang dengan membuka berbagai program studi yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum keluarga Islam. Perkembangan tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi di bidang syariah dan hukum Islam. Seiring perubahan status IAIN Imam Bonjol menjadi Universitas Islam Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017, Fakultas Syari'ah juga mengalami penguatan kelembagaan dan akademik. Hingga saat ini, Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang menjadi salah satu fakultas yang aktif dalam pengembangan kajian hukum Islam, hukum keluarga, hukum tata negara Islam, dan ekonomi syariah di Sumatera Barat. (<https://fs.uinib.ac.id>)

3.2. Visi dan Misi Fakultas Syari'ah

1. Visi dan Misi Fakultas Syari'ah

Visi :

Menjadi pusat pembelajaran keilmuan syariah yang kompetitif di Asia Tenggara dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul tahun 2040.

Misi :

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan Keilmuan Syariah yang berkualitas untuk menghasilkan sarjana yang beriman berilmu dan berbudaya
- 2) Menyelenggarakan Penelitian yang berkualitas untuk menghasilkan karya penelitian dan publikasi ilmiah yang bermanfaat;
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat untuk menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis riset
- 4) Menyelenggarakan pengelolaan fakultas yang profesional, berintegritas, kredibel, dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola yang baik.
(<https://fs.uinib.ac.id>.)

2. Visi dan Misi Program Studi Hukum Keluarga

Program Studi Hukum Keluarga Islam merupakan program studi tertua di Fakultas Syariah dibandingkan dengan tiga program studi lainnya. Sejarahnya dimulai sejak berdirinya Fakultas Syariah pada tahun 1966. Pada awal pendiriannya, program studi ini bernama *qadha*, yang memiliki arti pengadilan. Selanjutnya, pada tahun 1981 namanya diubah menjadi Peradilan Agama. Perubahan kembali dilakukan pada tahun 1992 dengan menggunakan nama *Ahwal Al-Syakhshiyah*. Setelah lebih dari dua dekade, tepatnya pada tahun 2017, nama program studi tersebut resmi menjadi Hukum Keluarga Islam.

Visi :

"Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu Hukum Keluarga di Indonesia Tahun 2040."

Adapun misi Program Studi Hukum Keluarga Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bidang Hukum Keluarga yang berwawasan dan multidisipliner.
- 2) Meningkatkan kompetensi dan keahlian sumber daya manusia dalam penegakan hukum dan keadilan.
- 3) Menyiapkan sumber daya lulusan yang mampu menjadi inisiator dan fasilitator pemberdayaan hukum dalam masyarakat.

Tujuan Program Studi Hukum Keluarga Islam terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, program studi ini bertujuan mewujudkan lulusan yang beriman dan berbudaya, berilmu serta berintegritas, berakhlak dan bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemandirian demi kemaslahatan umat dan bangsa. Sementara itu, secara khusus program studi ini bertujuan menjadikan Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah sebagai Laboratorium Pengembangan Ijtihad Sosial dalam mewujudkan transformasi sosial yang berkeimanan, berbudaya, dan berkeadilan bermartabat (Eliana, 2026:43).

3. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Perbandingan Mazhab

Program Studi Perbandingan Mazhab pertama kali didirikan pada tahun 1988 dengan nama Perbandingan Mazhab (PM). Selanjutnya, seiring dengan perkembangan disiplin ilmu, pada tahun 1995 nama program studi tersebut berubah menjadi Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH). Dalam perjalanannya, PMH dikenal sebagai salah satu program studi yang memiliki jumlah peminat relatif sedikit. Kondisi tersebut juga terjadi pada sebagian besar Program Studi PMH di berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia, termasuk UIN Jakarta. Meskipun demikian, dari sisi akademik program studi ini dipandang sebagai tempat yang tepat untuk memperdalam kajian hukum Islam secara lebih mendalam. Bahkan, salah satu sumber menyebutkan bahwa lulusan program studi ini banyak dipersiapkan

menjadi tenaga pengajar dalam bidang studi keislaman maupun dosen pada bidang Syariah.

Visi :

"Menjadi pusat pengembangan ilmu Perbandingan Mazhab di Indonesia tahun 2040."

Misi:

- 1) Menghasilkan sarjana syari'ah yang ahli dalam Perbandingan Mazhab.
- 2) Menghasilkan sarjana syari'ah yang menguasai metode istinbath, mampu berijtihad dan mampu mengembangkan penelitian dalam ilmu Perbandingan Mazhab.
- 3) Menghasilkan sarjana syari'ah yang menjadi inisiator dalam menyelesaikan persoalan hukum dan perbedaan pendapat dalam masyarakat.

Tujuan:

- 1) Terwujudnya program studi Perbandingan Mazhab sebagai pusat pengembangan ilmu Perbandingan Mazhab yang berorientasi kepada penguasaan konsep dan pemecahan masalah dalam berbagai perbedaan pendapat ulama klasik dan kontemporer.
- 2) Terwujudnya penelitian yang mampu berkompetitif dalam mengembangkan pengetahuan ilmu Perbandingan Mazhab yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan akademik dan masyarakat.
- 3) Terwujudnya sarjana yang mampu menjadi inisiator mediator dalam menyelesaikan persoalan hukum dan perbedaan pendapat di tengah masyarakat (Eliana, 2026:44).

4. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Hukum Tata Negara

Program Studi Hukum Tata Negara sebelumnya bernama Jinayah Siyasah (JS). Program studi ini merupakan jurusan termuda di bidang ilmu

hukum yang ada di Fakultas Syariah. Jurusan tersebut didirikan pada tahun 1996 sebagai hasil pengembangan dari Program Studi Muamalah Jinayah. Dalam pelaksanaan akademiknya, jurusan ini memusatkan kajian pada hukum tata negara Islam (Siyasah Syari'iyah), namun juga mempelajari aspek hukum pidana Islam. Adanya dua ruang lingkup keilmuan tersebut sempat menimbulkan berbagai pandangan mengenai identitas akademik program studi ini. Permasalahan serupa juga dialami oleh sejumlah Fakultas Syariah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia. Seiring perubahan status IAIN Padang menjadi UIN pada tahun 2016, nama jurusan resmi diubah dari Jinayah Siyasah (JS) menjadi Hukum Tata Negara (HTN) sehingga identitas keilmuannya menjadi lebih jelas.

Visi:

“Menjadi Pusat Pembelajaran Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah) yang kompetitif di Asia Tenggara dalam membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul Tahun 2040.”

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah) yang berkualitas untuk menghasilkan sarjana yang beriman, berilmu, dan berbudaya.
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk menghasilkan karya penelitian dan publikasi ilmiah yang bermanfaat di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah).
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis riset.
- 4) Menyelenggarakan pengelolaan program studi yang profesional, berintegritas, kredibel, dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola yang baik.

Tujuan:

- 1) Menghasilkan sarjana hukum yang mampu dan terampil dalam menganalisis persoalan-persoalan hukum khususnya di bidang hukum tata negara yang tengah berkembang di masyarakat serta memiliki sikap proaktif dan terbuka dalam melakukan pembaharuan hukum.
- 2) Menghasilkan sarjana hukum yang mampu berperan serta dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan hukum tata negara bagi terwujudnya masyarakat madani.
- 3) Menghasilkan praktisi hukum tata negara yang memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan global serta memiliki jiwa pengabdian terhadap masyarakat, agama, bangsa, dan negara (Eliana 2026, 45).

5. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sebelumnya dikenal dengan nama Muamalat yang mulai digunakan pada tahun 1995. Sebelum menggunakan nama tersebut, program studi ini bernama Muamalah Jinayah sejak tahun 1989. Perubahan nama tersebut merupakan bagian dari pengembangan keilmuan di lingkungan Fakultas Syariah yang kemudian melahirkan dua program studi baru, yaitu Muamalah dan Jinayah Siyasah, sebagai hasil pemekaran dari Program Studi Muamalah Jinayah. Walaupun secara administratif Program Studi Muamalat baru berdiri secara mandiri pada tahun 1999, penerimaan mahasiswa baru telah dilaksanakan sejak tahun 1995 (Eliana, 2026:46).

Visi :

“Menjadi pusat pembelajaran Hukum Ekonomi Syariah yang Kompetitif di Asia Tenggara dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul Tahun 2040”

Misi :

- 1) Menyelenggarakan pendidikan hukum ekonomi syariah yang berkualitas untuk menghasilkan sarjana yang beriman, berilmu, dan berbudaya.

- 2) Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk menghasilkan karya penelitian dan publikasi ilmiah yang bermanfaat di bidang hukum ekonomi syariah.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis riset.
- 4) Menyelenggarakan pengelolaan fakultas yang profesional, berintegritas, kredibel, dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola yang baik.

Tujuan:

Menghasilkan sarjana muslim yang mempunyai kemampuan akademis dan profesional dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang memiliki integritas dan ekosistem untuk mengembangkan lembaga ekonomi syariah (Eliana, 2026:46).

3.3. Profil Mahasiswa Fakultas Syari'ah

Berdasarkan data mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang pada periode 2021–2025, Program Studi Hukum Keluarga memiliki jumlah mahasiswa terbanyak, yaitu 1.017 orang. Selanjutnya, Program Studi Perbandingan Mazhab berjumlah 142 mahasiswa, Program Studi Hukum Tata Negara sebanyak 857 mahasiswa, dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sebanyak 612 mahasiswa. Dengan demikian, total mahasiswa Fakultas Syariah pada keempat program studi tersebut mencapai 2.628 orang (Eliana, 2026:47).

Tabel 3. 1
Jumlah Mahasiswa Aktif

Program Studi	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah
Hukum Keluarga	201	201	261	143	211	1.017
Perbandingan Madzhab	52	44	15	17	14	142
Hukum Tata Negara	167	201	205	130	154	857
Hukum Ekonomi Syari'ah	161	184	133	83	51	612

Sumber Data: Akama Fakultas Syari'ah 2026

Berdasarkan data mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang pada periode 2021–2025, Program Studi Hukum Keluarga memiliki jumlah mahasiswa terbanyak, yaitu 1.017 orang. Selanjutnya, Program Studi Perbandingan Mazhab berjumlah 142 mahasiswa, Program Studi Hukum Tata Negara sebanyak 857 mahasiswa, dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sebanyak 612 mahasiswa. Dengan demikian, total mahasiswa Fakultas Syariah pada keempat program studi tersebut mencapai 2.628 orang (Eliaha, 2026:47).

UIN IMAM BONJOL
PADANG